

Sosialisasi dan Penguatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Berdasarkan Kewenangan SMA, SMP, dan SD di Provinsi Jambi

Hartati¹, Helmi², Firmansyah Putra³, Dinda Syufradian Putra⁴, Dimas Subekti⁵, Amanda Dea Lestari⁶

^{1,2,3,6} *Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia*

^{4,5} *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia*

Received : 18 September 2026, Revised : 01 Oktober 2026, Published : 09 Oktober 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Dimas Subekti

E-mail: dimassubekti05@unja.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dan kepala sekolah mengenai regulasi pembagian kewenangan pendidikan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi Jambi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2026 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, diikuti oleh 50 peserta. Kegiatan menghadirkan empat narasumber, yaitu Dimas Subekti dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Ilham Khalik dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jaelani dari Sekretariat Daerah Kota Jambi, dan Lutpiah dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi. Metode pelaksanaan meliputi ceramah partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan dialog interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap dasar hukum dan mekanisme pembagian kewenangan pendidikan, teridentifikasinya sejumlah persoalan koordinasi lintas kewenangan di lapangan, serta tersusunnya komitmen awal untuk membangun forum koordinasi pendidikan daerah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya tata kelola pendidikan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkeadilan di Provinsi Jambi.

Kata kunci - kewenangan, kolaborasi, pendidikan, pemerintah daerah, sosialisasi

Abstract

This community service activity aims to enhance the understanding of local government officials and school principals regarding the regulations on the division of educational authority, while also strengthening cross-regional collaboration in the management of education in Jambi Province. The event was held on September 15, 2026, at the Jambi Provincial Education Office Auditorium, attended by 50 participants. The event featured four speakers: Dimas Subekti from the Faculty of Law, University of Jambi, Ilham Khalik from the Jambi Provincial Education Office, Jaelani from the Jambi City Regional Secretariat, and Lutpiah from the Jambi Provincial Bureau of Government and Regional Autonomy. The implementation methods included participatory lectures, focus group discussions, and interactive dialogs. The results of the activity show an increase in participants' understanding of the legal basis and mechanisms for the distribution of educational authority, the identification of several coordination issues across authorities in the field, and the initial commitment to establish a regional education coordination forum between the district/city government and the provincial government. This activity is expected to be the initial step toward the formation of a more integrated, effective, and equitable education governance in Jambi Province.

Keywords – authority, collaboration, education, local government, socialization

How To Cite : Hartati, H., Helmi, H., Putra, F., Putra, D. S., Subekti, D., & Lestari, A. D. (2026). Sosialisasi dan Penguatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Berdasarkan Kewenangan SMA, SMP, dan SD di Provinsi Jambi . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 5(2), 952 - 962. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v5i1.1820>

Copyright ©2026 Hartati Hartati, Helmi Helmi, Firmansyah Putra, Dinda Syufradian Putra, Dimas Subekti, Amanda Dea Lestari

PENDAHULUAN

Pengelolaan pendidikan berdasarkan kewenangan jenjang SMA, SMP, dan SD merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia (Dewi et al., 2025). Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan menengah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, sementara pengelolaan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tetap berada pada pemerintah kabupaten/kota (Faisal, 2022; Herawati, 2017; Laisan et al., 2026). Kebijakan ini pada dasarnya dirancang untuk memperjelas pembagian peran antartingkat pemerintahan agar pengelolaan pendidikan dapat berjalan lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing jenjang (Puspitasari & Wahyudi, 2025; Saputri & Sasongko, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan pengalihan kewenangan ini menimbulkan dinamika tersendiri, terutama terkait koordinasi lintas kewenangan dan konsistensi kebijakan antarlevel pemerintahan (Haq et al., 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi menyisakan sejumlah persoalan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (Habibi, 2017). Pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah menemukan bahwa proses transisi kewenangan seringkali tidak diiringi dengan kesiapan kelembagaan yang memadai di tingkat provinsi, sehingga menimbulkan kesenjangan pelayanan pada masa peralihan (Purwanto et al., 2020). Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya forum komunikasi formal antara pemerintah kabupaten/kota yang mengelola jenjang pendidikan dasar dengan pemerintah provinsi yang mengelola jenjang pendidikan menengah, sehingga perencanaan pendidikan pada kedua level pemerintahan seringkali berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung (Ali, 2017).

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi yang menerapkan pembagian kewenangan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan juga menghadapi tantangan serupa (Hartati, Dewi et al., 2026). Di satu sisi, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah pertama (SMP), termasuk penyediaan sarana prasarana, pengelolaan tenaga pendidik, serta penganggaran operasional sekolah. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh SMA dan SMK yang tersebar di sebelas kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, sebuah cakupan wilayah yang luas dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam. Perbedaan struktur kewenangan ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga kesinambungan layanan pendidikan, terutama pada masa transisi peserta didik dari jenjang SMP yang dikelola kabupaten/kota menuju jenjang SMA yang dikelola provinsi (Jahudin et al., 2025).

Permasalahan tersebut antara lain terlihat pada sinkronisasi data dan perencanaan pendidikan, penerimaan peserta didik baru, pemenuhan sarana dan prasarana, serta kesinambungan layanan dari SMP menuju SMA/SMK (Wismono, 2019). Data jumlah lulusan SMP yang tidak terintegrasi dengan perencanaan daya tampung SMA/SMK dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kapasitas layanan pendidikan (Sunarsih et al., 2025). Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal dan manajerial antarkabupaten/kota dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan dasar dan kesiapan peserta didik memasuki jenjang berikutnya (Saragih et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian kewenangan perlu didukung oleh mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif.

Tantangan lainnya adalah masih adanya potensi koordinasi sektoral dan perbedaan pemahaman mengenai batas kewenangan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kondisi ini dapat menghambat penyelesaian persoalan yang membutuhkan keterlibatan lintas jenjang dan lintas pemerintahan (Agustin, 2025; Kadfi et al., 2025). Oleh karena itu, sosialisasi diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan ruang koordinasi masing-masing pihak. Sementara itu, penguatan kolaborasi

diperlukan untuk mendorong pertukaran data, sinkronisasi perencanaan, serta penyelesaian persoalan pendidikan secara bersama dan berkelanjutan (Rambe et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi memandang perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penguatan kolaborasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan kewenangan SMA, SMP, dan SD di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada aparatur pemerintah daerah dan kepala sekolah mengenai dasar hukum pembagian kewenangan pendidikan, sekaligus membuka ruang dialog dan diskusi bersama guna mengidentifikasi persoalan koordinasi yang selama ini dihadapi serta merumuskan langkah-langkah kolaboratif untuk mengatasinya. Kegiatan ini juga sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya pada aspek kontribusi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat, dan melibatkan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam berbagai peran teknis sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan potensi rekognisi satuan kredit semester (SKS) di luar perkuliahan reguler.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini secara rinci adalah: meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dan kepala sekolah mengenai regulasi dan mekanisme pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA, SMP, dan SD; mendorong terbukanya ruang koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan; mengidentifikasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi di lapangan terkait fragmentasi kewenangan pendidikan; serta merumuskan langkah awal atau komitmen bersama untuk membangun forum koordinasi pendidikan daerah yang berkelanjutan. Artikel ini disusun untuk mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut, termasuk proses, hasil, dan pembahasannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus kontribusi keilmuan bagi pengembangan tata kelola pendidikan berbasis kewenangan di daerah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan sosialisasi partisipatif yang dipadukan dengan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) dan dialog interaktif (Meliyana et al., 2025; Suhairi et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dihadapi bersifat lintas kewenangan dan memerlukan pertukaran informasi dua arah antara narasumber dan peserta, bukan sekadar penyampaian materi satu arah. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas bagi peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, serta relevansi lokasi sebagai representasi institusi yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan pendidikan jenjang SMA di tingkat provinsi.

Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang terdiri atas perwakilan pemerintah daerah dan kepala sekolah jenjang SMA, SMP, dan SD dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Pemilihan peserta didasarkan pada peran strategis mereka dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi melalui penyampaian materi mengenai pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan koordinasi dan kolaborasi antarkewenangan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan selama pelaksanaan sosialisasi, meliputi keterlibatan peserta dalam mengikuti penyampaian materi, keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab, serta kesesuaian materi dengan permasalahan pengelolaan pendidikan yang disampaikan peserta. Evaluasi tidak menggunakan pre-test, post-test, maupun kuesioner, tetapi didasarkan pada hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi partisipasi peserta. Hasil evaluasi digunakan untuk menggambarkan keterlaksanaan kegiatan sosialisasi dan respons peserta terhadap materi serta diskusi yang diberikan.

Kegiatan menghadirkan empat narasumber yang mewakili unsur akademisi, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

1. Dimas Subekti, S.I.P., M.I.P., dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang menyampaikan materi mengenai dasar hukum dan mekanisme pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya;

2. Dr. Ilham Khalik, S.H., M.H., dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang menyampaikan materi mengenai kebijakan teknis dan program pengelolaan pendidikan menengah (SMA) di tingkat provinsi, termasuk kebijakan penerimaan peserta didik baru dan distribusi tenaga pendidik;
3. Dr. H. M. Jaelani, S.H., M.H., dari Sekretariat Daerah Kota Jambi, yang menyampaikan perspektif pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan dasar (SD dan SMP) serta tantangan koordinasi dengan pemerintah provinsi; dan
4. Dra. Luthpiah, dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi, yang menyampaikan materi mengenai kebijakan otonomi daerah dan pentingnya sinergi antarkewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tiga bentuk utama, yaitu ceramah partisipatif, diskusi kelompok terarah (FGD), dan dialog interaktif. Ceramah partisipatif digunakan untuk menyampaikan materi dasar hukum, kebijakan teknis, dan perspektif kelembagaan dari masing-masing narasumber, dengan tetap membuka ruang tanya jawab pada setiap sesi. Diskusi kelompok terarah dilaksanakan setelah seluruh sesi pemaparan materi selesai, di mana peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan kesamaan wilayah dan jenjang kewenangan untuk mendiskusikan persoalan koordinasi yang dihadapi di lapangan serta merumuskan usulan solusi. Dialog interaktif dilaksanakan pada sesi pleno untuk menyatukan hasil diskusi kelompok dan merumuskan kesepakatan atau rekomendasi bersama.

Secara rinci, tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan dan sosialisasi (pra-implementasi), yang mencakup koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten/kota, dan kepala sekolah untuk menetapkan lokasi, jadwal, serta daftar peserta kegiatan; penyusunan materi sosialisasi oleh tim pengabdian bersama narasumber; serta penyebaran undangan resmi kepada seluruh calon peserta. Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 September 2026, yang meliputi sesi pembukaan, sesi pemaparan materi oleh keempat narasumber secara berurutan, sesi diskusi kelompok terarah, dan sesi dialog interaktif serta perumusan kesepakatan bersama. Ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut, yang meliputi pengisian instrumen evaluasi oleh peserta untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video, serta perencanaan tindak lanjut berupa pembentukan forum koordinasi pendidikan daerah.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ini bersifat aktif dan tidak hanya sebatas sebagai peserta pasif penerima materi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berperan dalam menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta menugaskan narasumber dari unsur pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota, yang diwakili oleh kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah, berperan aktif dalam sesi diskusi kelompok dengan menyampaikan pengalaman dan persoalan riil yang dihadapi di wilayah masing-masing. Keterlibatan aktif mitra ini menjadi kunci keberhasilan kegiatan, mengingat substansi permasalahan yang dibahas bersumber langsung dari kondisi lapangan yang dialami oleh mitra sasaran.

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan dengan mengamati tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk intensitas pertanyaan dan tanggapan yang muncul pada setiap sesi. Evaluasi hasil dilakukan melalui instrumen kuesioner sederhana yang dibagikan kepada peserta pada akhir kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Keberlanjutan program pasca-kegiatan direncanakan melalui pembentukan forum koordinasi pendidikan daerah yang akan difasilitasi secara berkala oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota, serta pendampingan lanjutan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam penyusunan dokumen kesepakatan atau rekomendasi kebijakan kolaboratif.

Tim pelaksana kegiatan pengabdian ini terdiri atas satu orang ketua dan sembilan orang anggota. Prof. Dr. Hartati, S.H., M.H., bertindak sebagai ketua tim yang bertanggung jawab merancang tema dan isu kegiatan, menyusun materi sosialisasi, menjalin jejaring dengan mitra, serta mengendalikan keseluruhan proses pelaksanaan hingga penyusunan artikel jurnal. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., dan Dr. Firmansyah Putra, S.H., M.H., berperan sebagai anggota tim yang bertanggung jawab

dalam pengumpulan data, penyusunan latar belakang, pengurusan perizinan, serta pengolahan data lapangan. Dinda Syufradian Putra, S.Sos., M.Si., Dimas Subekti, S.IP., M.IP., dan Amanda Dea Lestari, S.H., M.H. berperan dalam penyusunan metode pelaksanaan, rencana anggaran, serta turut menjadi narasumber kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan penguatan kolaborasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan kewenangan SMA, SMP, dan SD dilaksanakan pada tanggal 15 September 2026 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kegiatan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri atas kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan kepala sekolah jenjang SMA, SMP, dan SD. Kehadiran peserta dari berbagai kabupaten/kota menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan daerah terhadap forum yang membahas persoalan koordinasi lintas kewenangan pendidikan secara langsung dan komprehensif. Kegiatan dibuka secara resmi dengan sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam menjaga mutu dan pemerataan layanan pendidikan di Provinsi Jambi, serta sambutan dari Ketua Tim Pengabdian yang menyampaikan latar belakang, tujuan, dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembukaan kegiatan berlangsung dengan antusias, ditandai dengan kehadiran penuh peserta undangan serta keterlibatan aktif sejak sesi awal.

Sesi pertama pemaparan materi disampaikan oleh Dimas Subekti dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang mengangkat topik dasar hukum dan mekanisme pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan secara komprehensif ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk latar belakang filosofis pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dari kabupaten/kota kepada provinsi. Narasumber juga menekankan bahwa pembagian kewenangan tersebut idealnya tidak menghalangi koordinasi antarlevel pemerintahan, melainkan tetap memerlukan mekanisme kerja sama formal agar layanan pendidikan tetap berjalan secara berkesinambungan, khususnya pada masa transisi peserta didik dari SMP ke SMA. Materi ini mendapatkan perhatian besar dari peserta, terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait implementasi teknis ketentuan hukum tersebut di lapangan, termasuk pertanyaan mengenai batasan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan dukungan terhadap SMA di wilayahnya.



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Dimas Subekti, S.I.P.,M.I.P.

Sesi kedua disampaikan oleh Dr. Ilham Khalik., S.H.,M.H. dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang memaparkan kebijakan teknis dan program pengelolaan pendidikan menengah di tingkat provinsi. Narasumber menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dan sedang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mengelola SMA dan SMK yang tersebar di sebelas kabupaten/kota, termasuk kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB), pemetaan daya tampung sekolah, serta distribusi dan pemerataan tenaga pendidik. Narasumber juga mengakui adanya tantangan dalam menjangkau seluruh satuan pendidikan secara merata, khususnya di wilayah dengan aksesibilitas geografis yang rendah, dan menyampaikan pentingnya masukan data dari pemerintah kabupaten/kota terkait proyeksi jumlah lulusan SMP untuk mendukung perencanaan daya tampung SMA yang lebih akurat.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Dr. Ilham Khalik., S.H.,M.H.

Sesi ketiga disampaikan oleh Dr. H. M. Jaelani, S.H., M.H., dari Sekretariat Daerah Kota Jambi, yang menyampaikan perspektif pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan dasar. Narasumber memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan mutu pendidikan SD dan SMP, sekaligus menyampaikan sejumlah kendala koordinasi yang selama ini dihadapi dengan pemerintah provinsi, terutama terkait ketiadaan forum komunikasi formal yang rutin antara kedua level pemerintahan. Narasumber menekankan pentingnya adanya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur agar data dan kebijakan antara pengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat saling terhubung, sehingga transisi peserta didik antarjenjang dapat berjalan lebih lancar.



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Dr. H. M. Jaelani, S.H., M.H.,

Sesi keempat disampaikan oleh Dra. Luthpiah, dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi, yang mengangkat topik kebijakan otonomi daerah dan pentingnya sinergi antarkewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Narasumber menjelaskan kerangka regulasi otonomi daerah secara lebih luas, termasuk mekanisme koordinasi antarurusan pemerintahan konkuren, dan mendorong agar forum-forum koordinasi lintas kewenangan seperti kegiatan sosialisasi ini dapat dilembagakan secara berkala, tidak hanya bersifat insidental. Narasumber juga menyampaikan kesiapan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi untuk memfasilitasi penyusunan nota kesepahaman atau bentuk kesepakatan formal lainnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan pendidikan.



Gambar 4. Pemaparan Materi oleh Dra. Luthpiah,

Setelah seluruh sesi pemaparan materi selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah yang membagi peserta ke dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan kesamaan wilayah kabupaten/kota. Diskusi ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam persoalan koordinasi lintas kewenangan yang dihadapi di lapangan serta merumuskan usulan solusi yang aplikatif. Dari hasil diskusi kelompok, teridentifikasi sejumlah persoalan utama, di antaranya: belum adanya mekanisme pertukaran data yang rutin antara dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi terkait jumlah dan sebaran lulusan SMP; minimnya forum komunikasi formal antarkepala sekolah lintas jenjang dalam satu wilayah; perbedaan kebijakan zonasi antara jenjang SMP dan SMA yang menyulitkan peserta didik dalam proses transisi; serta keterbatasan anggaran di sejumlah kabupaten/kota untuk mendukung program-program yang memerlukan koordinasi lintas kewenangan.



Gambar 5. Dokumentasi FGD

Berdasarkan persoalan tersebut, peserta merumuskan sejumlah usulan solusi dalam sesi dialog interaktif, antara lain: pembentukan forum koordinasi pendidikan daerah yang beranggotakan dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi serta perwakilan kepala sekolah; penyusunan sistem data pendidikan terintegrasi yang dapat diakses bersama oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi; penyalarsan kebijakan zonasi dan penerimaan peserta didik baru antarjenjang; serta penjadwalan pertemuan koordinasi rutin minimal dua kali dalam satu tahun ajaran. Usulan-usulan tersebut kemudian disepakati bersama sebagai bentuk komitmen awal kolaborasi antarpemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pengisian instrumen evaluasi yang dibagikan kepada peserta pada akhir kegiatan, mayoritas peserta menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman baru

mengenai dasar hukum dan mekanisme pembagian kewenangan pendidikan yang selama ini belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif. Peserta juga menyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat dalam membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, yang selama ini jarang terjadi dalam forum formal. Dari aspek pelaksanaan, peserta menilai metode ceramah partisipatif yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok terarah cukup efektif dalam mendorong keterlibatan aktif seluruh peserta, tidak hanya menjadi pendengar pasif. Beberapa masukan yang disampaikan peserta untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang antara lain perlunya alokasi waktu diskusi kelompok yang lebih panjang serta perluasan cakupan peserta hingga ke tingkat pengawas sekolah dan komite sekolah.

Hasil pelaksanaan sosialisasi menunjukkan bahwa koordinasi lintas kewenangan masih menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi Jambi. Hal tersebut teridentifikasi melalui pembahasan dan diskusi dengan peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Beberapa isu yang mengemuka meliputi kebutuhan sinkronisasi data antarkewenangan, koordinasi dalam perencanaan layanan pendidikan, serta kesinambungan pengelolaan peserta didik dari jenjang SMP menuju SMA/SMK. Selain mengidentifikasi persoalan tersebut, kegiatan juga menghasilkan pemahaman bersama mengenai pentingnya pembagian peran yang jelas dan komunikasi antarpemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Peserta terlibat dalam diskusi mengenai batas kewenangan masing-masing serta kebutuhan koordinasi pada persoalan yang melibatkan lebih dari satu jenjang pendidikan. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya berupa penyampaian materi sosialisasi, tetapi juga teridentifikasinya isu koordinasi yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan Pendidikan. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Aderempas et al., 2025; Iskandar, 2018; Prasajo, 2023) yang menyatakan bahwa alih kewenangan pengelolaan guru dan sekolah menengah dari kabupaten/kota kepada provinsi kerap tidak diiringi dengan penguatan mekanisme koordinasi yang memadai, sehingga menimbulkan potensi disharmoni kebijakan pada level implementasi. Kegiatan sosialisasi ini memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan informasi tersebut, dengan menghadirkan secara langsung narasumber dari unsur akademisi, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam satu forum yang sama.

Pendekatan kolaboratif yang diterapkan dalam kegiatan ini juga relevan dengan gagasan mengenai pentingnya model sinergi tata kelola pendidikan yang melibatkan pemerintah daerah dan satuan pendidikan secara berkelanjutan (Miranda et al., 2026; Mulyanto et al., 2026; Susanti et al., 2026; Tabo et al., 2025)(Rambe et al., 2025). Komitmen awal peserta untuk membentuk forum koordinasi pendidikan daerah yang dihasilkan dari kegiatan ini merupakan langkah konkret menuju terwujudnya model kolaborasi tersebut, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut yang dilakukan pasca-kegiatan. Dalam hal ini, peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi yang menyatakan kesiapan memfasilitasi penyusunan nota kesepahaman menjadi modal penting untuk memastikan keberlanjutan komitmen tersebut tidak berhenti pada tataran wacana.

Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Al Huda, 2025; Kirmadi et al., 2025; Manullang, 2025). Kehadiran kepala sekolah sebagai peserta aktif dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa persoalan koordinasi kewenangan tidak hanya menjadi urusan aparatur dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, tetapi juga sangat dirasakan langsung oleh satuan pendidikan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Keterlibatan kepala sekolah dalam diskusi kelompok terarah memberikan perspektif tambahan mengenai dampak fragmentasi kewenangan terhadap operasional sekolah sehari-hari, seperti kesulitan dalam memperoleh data lulusan dari jenjang sebelumnya atau ketidakjelasan mekanisme pelaporan lintas level pemerintahan.

Dari perspektif regulasi, pemaparan Dimas Subekti mengenai dasar hukum pembagian kewenangan pendidikan memberikan landasan konseptual yang penting bagi peserta untuk memahami bahwa persoalan koordinasi yang mereka hadapi bukanlah semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan juga berkaitan dengan desain kelembagaan otonomi daerah secara keseluruhan. Pemahaman ini sejalan dengan temuan (Al Huda, 2025) yang menyatakan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia memiliki implikasi kebijakan yang luas dan memerlukan pemahaman yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum semacam ini menjadi salah satu instrumen penting

dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan pendidikan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini juga memberikan pembelajaran penting mengenai efektivitas metode ceramah partisipatif yang dipadukan dengan diskusi kelompok terarah dalam konteks pengabdian kepada masyarakat yang bersifat lintas kelembagaan. Berbeda dengan kegiatan sosialisasi konvensional yang hanya bersifat satu arah, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusi. Hal ini sejalan dengan prinsip pengabdian kepada masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan mitra, bukan sekadar transfer pengetahuan satu arah dari akademisi kepada masyarakat sasaran.

Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi catatan untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang. Pertama, durasi kegiatan yang relatif terbatas dalam satu hari menyebabkan sesi diskusi kelompok tidak dapat membahas seluruh persoalan secara mendalam. Kedua, cakupan peserta yang hanya melibatkan kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah belum menjangkau pemangku kepentingan lain seperti pengawas sekolah, komite sekolah, dan orang tua peserta didik yang juga memiliki peran penting dalam mendukung transisi antarjenjang pendidikan. Ketiga, tindak lanjut berupa pembentukan forum koordinasi pendidikan daerah masih memerlukan pendampingan lebih lanjut agar komitmen yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan, mengingat forum semacam ini rentan berhenti pada tahap wacana apabila tidak didukung oleh mekanisme kelembagaan yang jelas dan konsisten.

Sebagai tindak lanjut, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi berencana untuk mendampingi penyusunan draf nota kesepahaman atau rekomendasi kebijakan kolaboratif dalam beberapa bulan ke depan, sebagaimana direncanakan pada tahap pendampingan rutin selama tiga hingga enam bulan pascakegiatan. Pendampingan ini diharapkan dapat menjembatani komitmen yang telah dibangun dalam kegiatan sosialisasi menjadi dokumen kesepakatan formal yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam menjalankan kewenangan pendidikan secara lebih terkoordinasi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan penguatan kolaborasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan kewenangan SMA, SMP, dan SD yang dilaksanakan pada 15 September 2026 di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk membahas pembagian kewenangan serta persoalan koordinasi dalam pengelolaan pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi dan dialog dengan peserta, temuan utama kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sinkronisasi data, koordinasi perencanaan, komunikasi antarlembaga, dan kesinambungan layanan pendidikan antarkewenangan, khususnya pada peralihan dari jenjang SMP menuju SMA/SMK. Kegiatan juga menghasilkan penguatan pemahaman bersama mengenai pentingnya pembagian peran yang jelas serta koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bentuk penguatan kolaborasi yang teridentifikasi dalam kegiatan meliputi peningkatan komunikasi antarpemangku kepentingan, pertukaran informasi dan data pendidikan, serta koordinasi dalam penyelesaian persoalan yang melibatkan lebih dari satu jenjang pendidikan. Diskusi juga menghasilkan komitmen awal untuk mendorong forum koordinasi pendidikan daerah yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan koordinasi yang lebih berkelanjutan melalui forum komunikasi antarpemerintah daerah, penguatan mekanisme pertukaran data pendidikan, serta penyusunan pola koordinasi yang lebih jelas pada isu-isu yang bersinggungan dengan kewenangan SMA, SMP, dan SD. Dengan demikian, pembagian kewenangan dapat berjalan seiring dengan penguatan kolaborasi sehingga kesinambungan dan kualitas layanan pendidikan di Provinsi Jambi dapat lebih terjamin. Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan, disarankan beberapa hal untuk keberlanjutan program: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota perlu segera menindaklanjuti komitmen pembentukan forum koordinasi pendidikan daerah dengan menyusun struktur, mekanisme kerja, dan jadwal pertemuan rutin yang jelas; perlu dikembangkan sistem data pendidikan terintegrasi yang dapat diakses bersama oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi guna mendukung

perencanaan daya tampung dan distribusi sumber daya pendidikan yang lebih akurat; kegiatan sosialisasi serupa perlu diperluas cakupannya pada masa mendatang dengan melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan unsur masyarakat lainnya; serta diperlukan pendampingan lanjutan dari perguruan tinggi untuk mengawal proses penyusunan dokumen kesepakatan atau rekomendasi kebijakan kolaboratif agar komitmen yang telah dibangun dapat terimplementasi secara nyata dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi yang telah mendukung penuh proses pengabdian ini. Kegiatan dan publikasi artikel didanai oleh LPPM Universitas Jambi dengan nomor kontrak 763/UN21.11/PM.01.01/SPK/2026

DAFTAR PUSTAKA

- Aderempas, T., Asha, L., & Harahap, E. K. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dan implikasinya terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 14(2), 217–234. <https://doi.org/10.36668/jal.v14i2.1510>
- Agustin, A. W. (2025). Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan kebijakan administratif: Analisis dari sudut pandang HAN. *Beleid*, 3(2), 168–195. <https://doi.org/10.51825/beleid.v3i2.33231>
- Al Huda, U. (2025). Peran stakeholder dalam meningkatkan manajemen mutu pendidikan. *Pijar Pelita: Journal of Early Childhood Education and Early Childhood Islamic Education*, 1(2), 182–194.
- Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Dewi, R. K., Sari, A. F., Rahayu, S. S., Sukodoyo, & Sukarmin. (2025). Desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia: Dampak, tantangan, dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3793>
- Faisal, A. F. (2022). Analisis pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi di Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 96–102. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v2i3.329>
- Habibi, F. (2017). Transisi peralihan kewenangan bidang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten. *Jurnal Sawala*, 5(2), 11–22.
- Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Desentralisasi dan harmonisasi kebijakan: Rekonstruksi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 17–32. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>
- Hartati, H., Dewi, R., Raharja, I. F., & Subekti, D. (2026). Local government responsibility in ensuring legal protection for teachers: A case study of Jambi Province. *Indonesian State Law Review*, 9(1), 62–83. <https://doi.org/10.15294/islrev.v9i1.35911>
- Herawati, N. R. (2018). Analisis politik alih kewenangan pengelolaan guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 72–93. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.72-93>
- Iskandar, A. Y. (2018). *Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sekolah menengah atas sederajat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus di Kabupaten dan Kota Mojokerto* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- Jahudin, A. A., Amelia, A., Jingga, B. K., Taqiyya, H., Syafrudin, L., Situmorang, M., Mustaqim, M. Y., Ramadhan, N. A., Sari, N. N., Maulida, R., Senda, T. A., Mayasari, L. I., & Listyasari, W. D. (2025). *Manajemen pendidikan nasional: Antara kebijakan, nilai dan tantangan zaman*. Sahabat Akademia Group.
- Kadfi, C. M., Fachrudin, M. D., Julyanto, A., & Andirman. (2025). *Manajemen peserta didik: Teori, aplikasi, dan inovasi pengelolaan di lembaga pendidikan*. Canra Muhammad Kadfi.
- Kirmadi, Y., Muhtadin, M., Kurnia, A., & Abduloh. (2025). Peran dan fungsi kemitraan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah atas. *Jurnal Tahsinia*, 6(11), 1673–1684. <https://doi.org/10.57171/b5n6z461>

- Laisaan, R. A., Nabila, N., & Zaironi, M. (2026). Analisis kritis kebijakan desentralisasi pendidikan nasional dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 16291–16310. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11117>
- Manullang, S. G. (2025). Penguatan manajemen satuan pendidikan dalam mewujudkan sekolah bermutu dan berdaya saing. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 2(2), 641–645. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/view/1026>
- Meliyana, S. M., Ahmar, A. S., Rusli, R., Rahman, A., & Musa, H. (2025). Optimalisasi partisipasi masyarakat melalui focus group discussion (FGD) dalam program Kampung Bersih Nusantara di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 94–100. <https://doi.org/10.35877/panrannuangku3926>
- Miranda, M., Mujiati, M., & Nurzaima, N. (2026). Optimalisasi tata kelola administrasi melalui pendekatan kolaboratif: Studi kasus di SMP Negeri 10 Kendari. *Edum Journal*, 9(1), 52–67. <https://doi.org/10.31943/edumjournal.v9i1.595>
- Mulyanto, A., Hamdani, A., Ratnaningsih, D., Fahmi, R. N., Anggara, R., Muniroh, N. Y., & Witosari, S. W. E. (2026). *Manajemen pendidikan berbasis kearifan lokal: Sinergi antara sekolah dan dinas pendidikan*. Penerbit Widina.
- Prasojo, E. (2023). *Isu-isu kontemporer kebijakan dan governansi publik di Indonesia*. Prenada Media.
- Purwanto, T., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2019). Desentralisasi pendidikan (Studi efektifitas alih kelola kewenangan pengelolaan pendidikan sekolah menengah umum oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1), 58–73. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1>
- Puspitasari, R. A., & Wahyudi, E. (2025). Pemenuhan hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah. *Ultra Petita*, 1(1). <https://ultrapetita.hihihi.or.id/index.php/JHLG/article/view/5>
- Rambe, A. M., Ritonga, A. H., Constantia, E. C., & Sumitro, S. (2025). Sinergi tata kelola pendidikan dasar di era desentralisasi: Model kolaborasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk peningkatan mutu berkelanjutan. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 933–941. <https://doi.org/10.61253/tnn5ts54>
- Saputri, W. A., & Sasongko, R. N. (2023). Analisis kebijakan pengalihan pengelolaan SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 17(2), 149–154. <https://doi.org/10.33369/mapen.v17i2.31876>
- Saragih, P. Y., Depari, F. W. S. B., Puspitasari, D., & Shandi, K. (2025). Pengaruh politik desentralisasi dan budaya daerah terhadap mutu pendidikan dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 642–657. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i4.35696>
- Suhairi, S., Marpaung, F. N., Kahar, M. H. A., Farhan, M., Zahra, P., Yulistia, S. H., Alyanisa, F., Hafiza, N., Ahmadi, F., & Maulana, C. (2025). Pendekatan partisipatif KKN dalam memperkuat moderasi beragama melalui dialog antaragama di Desa Simpang Siguragura. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 1090–1104. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i4.2720>
- Sunarsih, E., Handoyo, E., & Rokhman, F. (2025). Minimnya minat lulusan SMP/MTs terhadap pendidikan vokasional (SMK) di Indonesia: Analisis faktor dan rekomendasi strategis. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 307–322. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27024>
- Susanti, S., Effendi, A., Fauzan, A. N., & Partono, P. (2026). Model tata kelola pendidikan berbasis good governance untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan. *Educational Journal*, 1(4), 2570–2582. <https://doi.org/10.63822/31dwt07>
- Tabo, D. A., Maksum, D. A., Pantuko, M., Saleh, S. A., Ruhban, S., & Indriani, N. P. I. (2025). Kebijakan pendidikan dan advokasi: Membangun sinergi antara Dinas Pendidikan dan masyarakat di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 1(1), 88–97. <https://doi.org/10.63822/f28ett10>
- Wismono, A. (2019). Manajemen penerimaan peserta didik dari keluarga miskin untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(1), 89. <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i1.3651>